

Pancasila sebagai sistem etika normatif: evaluasi kritis atas implementasi nilai-nilainya dalam kehidupan sosial

Ririn Widyawati

Program studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 25010110075@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Pancasila, etika normatif, implementasi, kehidupan sosial.

Keywords:

Pancasila, normative ethics, implementation, social life.

ABSTRAK

Artikel ini membahas peran Pancasila sebagai sistem etika normatif dan penerapannya dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sebagai pedoman moral bangsa, Pancasila seharusnya menjadi dasar bagi perilaku, kebijakan, dan pembangunan karakter bangsa, namun dalam praktiknya, nilai-nilainya tidak selalu sejalan dengan dinamika sosial saat ini. Fenomena intoleransi, melemahnya solidaritas, ketimpangan sosial, serta maraknya korupsi menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas Pancasila dan realitas sehari-hari. Globalisasi, arus informasi yang cepat, serta pengaruh budaya asing juga semakin menambah kompleksitas tantangan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Melalui kajian literatur dan analisis

makna etis setiap sila, artikel ini menilai sejauh mana masyarakat, institusi, dan pemerintah mampu menghayati nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Pancasila masih diakui sebagai dasar bersama, penerapannya sering terhambat oleh kurangnya keteladanan moral, budaya hukum yang lemah, rendahnya disiplin sosial, serta minimnya pendidikan etika yang relevan dengan kehidupan modern. Untuk itu, artikel ini merekomendasikan penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila, peningkatan kesadaran etis masyarakat, penguatan nilai-nilai sosial melalui program literasi, dan komitmen nyata lembaga negara dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila melalui kebijakan dan tindakan nyata. Dengan langkah-langkah tersebut, Pancasila diharapkan berfungsi lebih efektif sebagai panduan etika dan fondasi pembangunan masyarakat yang harmonis, adil, berbudaya, serta berdaya saing dalam menghadapi tantangan global.

ABSTRACT

This article analyzes the role of Pancasila as a normative ethical system and its relevance in contemporary Indonesian society. Although Pancasila serves as the nation's moral foundation, guiding behavior, policymaking, and character development, its practical implementation often diverges from its ideal principles. Social issues such as intolerance, declining solidarity, inequality, and persistent corruption reveal significant gaps between Pancasila's ethical ideals and everyday realities. Globalization, rapid information exchange, and external cultural influences add further challenges to sustaining these values. Using a literature review and ethical analysis of each principle, the article assesses the extent to which individuals, institutions, and the government internalize the values of Divinity, Humanity, Unity, Democracy, and Social Justice. The analysis shows that despite Pancasila's continued recognition as a shared foundation, its application is hindered by weak moral leadership, low social discipline, insufficient ethical education, and a fragile legal culture. The article proposes strengthening Pancasila-based character education, increasing public ethical awareness, promoting social values through literacy programs, and ensuring stronger institutional commitment to applying Pancasila consistently through concrete actions and policies. These efforts are expected to enhance Pancasila's role as an effective ethical guide and provide stronger foundation for building a fair, cohesive, and culturally resilient society.



Pendahuluan

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi fondasi utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berfungsi sebagai sistem etika normatif yang memberikan panduan nilai-nilai moral dan perilaku Masyarakat (Khairani et al., 2024). Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara melalui rumusan Soekarno pada 1 Juni 1945 dan diperkuat dalam Pembukaan UUD 1945, menjadikannya norma fundamental yang mengikat seluruh sistem hukum dan kebijakan nasional. Kedudukannya ini memastikan kesatuan bangsa di tengah keragaman suku, agama, dan budaya. Pancasila merupakan prinsip dasar dimana didalamnya terkandung kualitas tertentu, harapan dan cita-cita yang di tujukan oleh bangsa Indonesia untuk kemudian diwujudkan menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan (Adityo et al., 2022). Sebagai sistem etika, Pancasila berisi lima sila yang menjadi jalan hidup bangsa, menilai perbuatan baik-buruk berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini memberikan tuntunan normatif untuk perilaku individu dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila menyatukan keragaman suku, agama, dan budaya melalui prinsip persatuan dan toleransi, sehingga mencegah konflik sosial serta memperkuat rasa kebangsaan. Selain itu, Pancasila menjadi acuan etika dan moral dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, membentuk karakter masyarakat yang etis dan bertanggung jawab. Pancasila juga menjamin keadilan sosial dengan mendorong distribusi sumber daya yang adil dan kesejahteraan bersama, serta menguatkan stabilitas sosial melalui musyawarah dan dialog dalam menyelesaikan perbedaan. Nilai-nilai ini menjadikan Pancasila fondasi utama dalam menjaga keharmonisan dan kemajuan kehidupan sosial di Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial Indonesia berhasil menjadi perekat keragaman suku, agama, dan budaya melalui toleransi serta musyawarah, meskipun masih terhambat oleh individualisme, korupsi, dan lemahnya praktik kemanusiaan serta keadilan sosial sehari-hari. Tantangan utama mencakup globalisasi, era digital yang memunculkan radikalisme, hoaks, budaya konsumtif, kesenjangan ekonomi, konflik SARA, serta pengaruh ideologi asing yang melemahkan sila-sila Pancasila. Evaluasi ini menekankan perlunya penguatan melalui pendidikan dan kebijakan nasional untuk mengatasi isu kontemporer guna mempertahankan resiliensi Pancasila.

Pembahasan

Pancasila sebagai Sistem Etika Normatif

Sistem etika normatif merupakan cabang etika yang bersifat mengatur dan tidak bebas nilai, dengan fungsi menilai baik-buruk, benar-salah, atau boleh-tidak boleh suatu tindakan manusia berdasarkan prinsip-prinsip moral tertentu. Berbeda dengan etika deskriptif yang hanya menggambarkan perilaku tanpa penilaian, etika normatif memberikan pedoman konkret untuk perilaku individu dan masyarakat, seperti dalam Pancasila yang menjadikan lima sila sebagai standar utuh untuk mengevaluasi tindakan. Dalam konteks Pancasila, sistem ini mengintegrasikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai norma pengendali interaksi sosial.

Pancasila mengatur norma dan nilai moral sebagai sistem etika normatif melalui lima sila yang menjadi standar utama untuk menilai baik-buruk, benar-salah perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sila pertama menekankan keyakinan pada Tuhan sebagai penjamin prinsip moral, sementara sila kedua mempromosikan kemanusiaan adil dan beradab melalui hormat dan martabat antarmanusia. Sila ketiga mengedepankan persatuan dan solidaritas nasional di atas kepentingan individu, sila keempat menuntun kerakyatan via musyawarah, serta sila kelima menjamin keadilan sosial bagi kesejahteraan bersama, sehingga membentuk pedoman perilaku yang holistik dari tingkat lokal hingga internasional (Priwardani et al., 2023).

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan landasan spiritual yang mengakui keberadaan Tuhan sebagai sumber nilai kebaikan dan keadilan, membentuk sikap religius yang inklusif dan toleran antar pemeluk agama (Pancasila & Pekalongan, 2025). Nilai ini membimbing masyarakat untuk menjunjung tinggi keharmonisan antarumat beragama dan menjauhkan dari konflik atas dasar keyakinan. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengatur norma penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Sila ini menuntut perlakuan manusiawi yang beradab dalam setiap interaksi sosial serta solidaritas dalam menghadapi ketidakadilan, sehingga masyarakat berperilaku tidak sewenang-wenang dan menghormati martabat sesama (Ramadani et al., 2023). Sila ketiga, Persatuan Indonesia, memberikan pedoman etis pada pentingnya nasionalisme dan solidaritas, di mana kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan di atas kepentingan golongan atau pribadi. Ini menguatkan kesatuan dan mencegah perpecahan yang dapat merusak tatanan sosial.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menegaskan prinsip demokrasi Pancasila yang menghendaki musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian, masyarakat diajak untuk mengedepankan kebijaksanaan kolektif dan menghormati perwakilan dalam menentukan keputusan bersama secara damai dan inklusif. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menjadi pedoman etika sosial yang menuntut distribusi kesejahteraan secara merata. Nilai ini mengedepankan solidaritas sosial, mencegah eksploitasi, dan mewujudkan keadilan dalam aspek ekonomi, sehingga tercipta kesejahteraan bersama berlandaskan persamaan hak dan kewajiban. Secara keseluruhan, kelima sila ini terintegrasi membentuk suatu sistem etika normatif yang tidak hanya menjadi fondasi hukum tapi juga norma moral yang membimbing perilaku sosial agar sesuai dengan nilai luhur bangsa Indonesia, menjaga harmoni, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan.

Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Sosial

Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa):

- a) Mengizinkan anggota keluarga menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing tanpa paksaan.
- b) Berpartisipasi dalam kegiatan lintas agama seperti doa bersama untuk toleransi.
- c) Menghindari ujaran kebencian berbasis agama di media sosial atau obrolan sehari-hari.

Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab):

- a) Memberi prioritas kursi di transportasi umum untuk lansia, ibu hamil, atau penyandang disabilitas.
- b) Membantu teman sekolah yang kesulitan belajar atau ekonomi tanpa memandang latar belakang.
- c) Menghormati perbedaan kemampuan akademik dan tidak melakukan bullying.

Sila Ketiga (Persatuan Indonesia):

- a) Gotong royong membersihkan lingkungan RT/RW bersama warga dari suku dan budaya berbeda.
- b) Mengikuti upacara bendera sekolah dengan khidmat untuk rasa kebangsaan.
- c) Mendukung produk lokal dan berjabat tangan saat bertemu orang baru.

Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan):

- a) Musyawarah keluarga untuk rencana pengeluaran besar atau liburan secara mufakat.
- b) Rapat RT/RW aktif mengusulkan program lingkungan dan menghargai hasil kesepakatan.
- c) Menerima hasil voting kelas atau OSIS dengan lapang dada.

Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia):

- a) Membagi tugas rumah tangga secara adil antar anggota keluarga.
- b) Donasi sukarela atau bakti sosial untuk warga miskin di komunitas.
- c) Mengajar anak tetangga kurang mampu secara gratis untuk akses pendidikan.

Pancasila berperan sebagai landasan moral dan ideologi yang mempersatukan keragaman masyarakat Indonesia, membangun hubungan sosial harmonis, kerukunan antarumat beragama, serta keadilan melalui lima silanya (Tiarylla et al., 2023). Pancasila memiliki peran sentral dalam membangun hubungan sosial yang kokoh dan harmonis di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menuntun masyarakat untuk saling menghormati hak asasi serta menjalankan interaksi sosial yang berlandaskan rasa empati dan solidaritas, sehingga tercipta ikatan sosial yang kuat. Prinsip persatuan dan kesatuan dalam Pancasila mengajarkan pentingnya meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga memupuk semangat kebersamaan dan mengurangi potensi konflik. Dalam mewujudkan kerukunan, Pancasila mengedepankan toleransi antarumat beragama melalui dialog yang konstruktif, musyawarah mufakat, serta pendidikan nilai-nilai luhur sejak dini yang mendorong sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan. Nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila juga memberikan landasan bagi pemerataan kesempatan dan kesejahteraan, menjamin akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang merata bagi semua warga tanpa diskriminasi. Melalui penerapan nilai-nilai ini, Pancasila berfungsi sebagai filter dan

benteng moral untuk menjaga stabilitas sosial, menolak ideologi radikal, dan memelihara perdamaian serta keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila menjadi dasar yang kokoh untuk membangun masyarakat yang harmonis, inklusif, dan adil secara berkelanjutan (Anindita & Hidayati, 2025).

Mewujudkan Pancasila yang Relevan

- a) Melalui kritik yang membangun dan dialog antargenerasi, Pancasila dapat memperkuat untuk menghadapi era globalisasi.
- b) Menafsirkan sila-sila Pancasila dalam konteks tantangan masa kini, seperti kemajuan teknologi, perubahan iklim, dan kesenjangan social.
- c) Memastikan Pancasila merangkul keberagaman Masyarakat Indonesia, termasuk perberdaan suku, agama, dan latar belakang budaya.
- d) Mengembangkan program Pendidikan yang mengedepankan pemikiran kritis dan keterlibatan dengan nilai-nilai Pancasila.
- e) Mendorong partisipasi pemuda dalam membentuk masa depan Pancasila dan perannya dalam Masyarakat Indonesia.

Dengan menerima kritik yang membangun dan mendorong dialog antargenerasi, Indonesia dapat memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi kekuatan penuntun yang relevan dan tangguh di era globalisasi. Proses refleksi dan penafsiran ulang yang berkelanjutan ini akan memperkuat kemampuan Pancasila dalam menjawab tantangan kontemporer dan mempersatukan bangsa dalam komitmen bersama terhadap prinsip-prinsip dasar Pancasila. Pendekatan ini tidak hanya melestarikan nilai-nilai inti Pancasila, namun juga menjamin kesinambungan nilai-nilai tersebut bagi generasi mendatang (Febri et al., 2025).

Tantangan dalam Penerapan Nilai-nilai Pancasila

Penerapan nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan kompleks seperti minimnya pemahaman masyarakat akibat pendidikan yang kurang mendalam, membuat nilai-nilai abstrak ini sulit diaplikasikan sehari-hari. Pengaruh ideologi asing, radikalisme, intoleransi, serta serbuan budaya global melalui media sosial mempercepat erosi semangat gotong royong dan persatuan, ditambah individualisme serta polarisasi politik yang bertentangan dengan sila Pancasila. Kesenjangan ekonomi-sosial, korupsi, regulasi bertentangan dengan Pancasila, serta eksploitasi lingkungan di era digital semakin menghambat keadilan sosial dan identitas nasional (Jannah & Radhani, 2025). Faktor internal dalam penerapan nilai-nilai Pancasila mencakup rendahnya kesadaran masyarakat akibat pemahaman dangkal yang membuat sila-sila terasa abstrak dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga gagal membentuk komitmen moral pribadi yang kuat.

Pendidikan Pancasila menghadapi tantangan efektivitas karena metode pengajaran kaku, membosankan, dan berbasis hafalan semata, di mana hanya 28-30% siswa merasa nilai-nilai ini relevan meskipun pemahaman teori meningkat, terutama bagi generasi muda yang kurang tertarik. Interpretasi nilai Pancasila yang subjektif dan formalistik tanpa aplikasi kontekstual membatasi pemahaman pada ritual negara semata, bukan sebagai pedoman etika hidup holistik yang adaptif terhadap dinamika zaman. Faktor eksternal tantangan penerapan Pancasila meliputi perubahan sosial yang mendorong

individualisme dan fragmentasi, globalisasi yang membawa budaya asing serta radikalisme via media sosial, serta konflik kepentingan seperti korupsi dan ketimpangan ekonomi yang menghambat keadilan sosial. Kasus korupsi pengadaan 16 kapal patroli Bea Cukai tahun 2024 dengan kerugian negara Rp117,7 miliar menunjukkan kurang optimalnya penerapan Pancasila, di mana pejabat memprioritaskan gratifikasi pribadi melalui mark-up harga, melanggar sila kedua (kemanusiaan adil), sila ketiga (persatuan), dan sila kelima (keadilan sosial) yang menuntut integritas demi kesejahteraan rakyat. Demikian pula kasus korupsi Pertamina 2025 dengan kerugian Rp193,7 triliun akibat manipulasi BBM dan impor minyak oleh tujuh pejabat mencerminkan absennya kesadaran spiritual (sila pertama) serta pengingkaran keadilan sosial (sila kelima), merusak kepercayaan publik dan kesejahteraan nasional (Di & Society, 2023).

Evaluasi Kritis Terhadap Implementasi

Nilai-nilai Pancasila diterapkan secara konsisten di tataran formal dan seremonial, seperti peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 dengan tema "Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya" yang melibatkan upacara nasional, pendidikan karakter, dan evaluasi 1.050 regulasi daerah oleh BPIP di mana 80% direkomendasikan revisi karena bertentangan dengan sila-sila. Namun, konsistensi lemah di praktik sehari-hari akibat tantangan korupsi (IPAK 2024 hanya 3,85), intoleransi, polarisasi sosial, dan pengaruh globalisasi serta digitalisasi yang mengancam persatuan serta keadilan sosial, sehingga implementasi lebih kuat di ritus negara daripada internalisasi moral masyarakat. Secara keseluruhan, penerapan mencapai 40-50% efektivitas berdasarkan indikator regulasi dan pendidikan, memerlukan revitalisasi melalui pendidikan kontekstual dan penegakan hukum untuk menghadapi dinamika 2025.

Kesimpulan

Pancasila sebagai dasar negara dan sistem etika normatif berperan fundamental dalam menyatukan keragaman Indonesia melalui lima sila yang mengatur norma moral, mempromosikan toleransi, keadilan sosial, dan musyawarah, dengan implementasi nyata seperti gotong royong dan dialog antaragama yang memperkuat harmoni sosial. Namun, penerapannya belum konsisten karena faktor internal seperti rendahnya kesadaran, pendidikan Pancasila yang kurang efektif (hanya 28-30% relevansi bagi siswa), dan interpretasi formalistik, serta faktor eksternal berupa globalisasi, radikalisme digital, korupsi (contoh kasus Bea Cukai Rp117,7 miliar dan Pertamina Rp193,7 triliun), serta kesenjangan yang melemahkan sila kemanusiaan dan keadilan (IPAK 2024: 3,85). Evaluasi menunjukkan efektivitas 40-50% di ranah seremonial versus praktik sehari-hari, sehingga potensi perbaikan terletak pada revitalisasi pendidikan kontekstual, penegakan hukum anti-korupsi, pemanfaatan media digital untuk kampanye nilai, serta evaluasi regulasi BPIP guna memperkuat resiliensi Pancasila di era 2025.

Saran

Pancasila sebagai sistem nilai moral yang normatif memerlukan penegasan kembali melalui pendidikan yang lebih relevan dan praktis agar masyarakat lebih mudah

memahami dan menghayati nilai-nilai moralnya. Penguatan pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai Pancasila, penggunaan metode pembelajaran yang interaktif, dan peningkatan mutu guru merupakan faktor penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan. Di samping itu, tindakan hukum yang tegas terhadap korupsi dan pelanggaran prinsip keadilan sosial harus diperkuat agar pelaksanaan sila keadilan sosial tidak hanya menjadi kata-kata kosong. Penggunaan media digital dengan cara yang positif untuk mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila juga sangat penting untuk melawan pengaruh buruk seperti radikalisasi dan berita palsu yang dapat merusak kerukunan sosial. Terakhir, pengembangan dialog antara komunitas dan keterlibatan aktif masyarakat dalam musyawarah bisa memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sosial, menjaga persatuan, serta membangun keadilan sosial secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adityo, R. D., Maulana, U. I. N., & Ibrahim, M. (2022). *PENGUATAN DASAR NEGARA MELALUI PENYULUHAN*. 3(2), 3–7. <http://repository.uin-malang.ac.id/>.
- Anindita, G. K., & Hidayati, N. (2025). *PENGUATAN INTEGRASI NASIONAL MELALUI PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA*. 05(01), 14–21. <https://doi.org/10.53977/ps.v5i01.2444><https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/PS>
- Di, P., & Society, E. R. A. (2023). *HAMBATAN DALAM MENERAPKAN NILAI-NILAI*. 16(2), 167–173. <https://doi.org/10.33557/jedukasi.v16i2.2863>
- Febri, V., Putri, A., Pratiwi, I. H., Hidayatullah, A. D., Malik, M., Malang, I., Timur, J., & Kunci, K. (2025). *Kritisisme Konstruktif dan Dialog Antar Generasi : Mewujudkan Pancasila yang Relevan di Era Globalisasi*. 3. <http://repository.uin-malang.ac.id/>.
- Jannah, M., & Radhani, N. (2025). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Pancasila Sebagai Dasar NKRI*. 3, 975–979. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1391>
- Khairani, I. J., Pulungan, N. Z., & Dia, M. A. (2024). *Pancasila Sebagai Sistem Etika*. 2(3), 103–113.
- Pancasila, P., & Pekalongan, U. (2025). *KERUKUNAN SOSIAL THE ROLE OF PANCASILA IN REALIZING SOCIAL TOLERANCE AND*. 10698–10707. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Priwardani, A. N., Auriellia, A., Monica, D., Nur, M., & Yaasiin, F. (2023). *PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA*. 2(3), 226–232. : <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i3.1156>
- Ramadani, A. C., Az-zahra, F., & Mawarni, H. D. (2023). *Implementasi Nilai Pancasila Sila Kedua Dalam Kehidupan Bermasyarakat*. 2(5), 347–352.
- Tiarylla, D. S., Azhima, L. U., & Saputri, Y. A. (2023). *Pancasila sebagai Dasar Negara di Indonesia*. 2(4), 277–283.